

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak yang dibayarkan orang pribadi dan perusahaan kepada pemerintah bermanfaat sebagai alat pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah aktivitas yang secara berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan sarana pendanaan dalam membiayai pembangunan yang berdasarkan untuk kepentingan umum (Waluyo, 2017). Menurut Kementerian Keuangan, Indonesia memperoleh penerimaan sebesar 1.539,7 triliun Rupiah pada tahun 2018 dan 1.556,8 triliun Rupiah pada tahun 2019, dimana sumber penerimaan negara terbesar yang tidak termasuk hibah diperoleh dari penerimaan perpajakan yang masing-masing pada tahun sebesar 1.518,8 triliun Rupiah atau 98,6% dan 1.546,1 triliun Rupiah atau 99,3%. Penerimaan negara digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional agar dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mencapai kesejahteraan hidup seluruh rakyat Indonesia (Puspita & Febrianti, 2017). Penerimaan pajak yang dianggarkan pemerintah setiap tahunnya tidak sesuai dengan jumlah yang terealisasi, pada tahun 2018 sebesar 93,9% penerimaan dari pajak yang terealisasi dan pada tahun 2019 hanya sebesar 86,5% (Kementerian Keuangan, 2019).

Pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan pendapatan pajak yang untuk mendanai kepentingan umum. Akan tetapi, tujuan negara untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan-perusahaan yang adalah wajib pajak. Perusahaan mengutamakan penerimaan laba yang tinggi bagi kesejahteraan perusahaan dan berusaha mengoptimalkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara semaksimal mungkin (Widuri *et al.*, 2020). Manajemen perusahaan akan berusaha untuk memperhitungkan dengan terperinci pajak yang harus dibayarkan agar dapat diminimalisasi karena pajak mempengaruhi arus kas dan laba bersih perusahaan, yang nantinya berkaitan dengan penilaian kinerja manajer (Nibras & Hadinata, 2020). Menurut Firmansyah dan Estutik (2020), sistem *self-assessment* yang dipakai di Indonesia memicu adanya pihak-pihak yang dapat melakukan perencanaan pajak sehingga memberikan celah terjadinya praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak dengan sengaja, hal ini menyebabkan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah berkurang.

Menurut Puspita dan Febrianti (2017), perusahaan cenderung memandang pajak sebagai sesuatu yang tidak memberikan keuntungan sehingga hal tersebut menyebabkan perusahaan terdorong untuk menghindari pajak dengan melaksanakan tindakan *tax avoidance*. Dalam praktik *tax avoidance*, teknik yang digunakan perusahaan dalam memperkecil jumlah beban pajak yang wajib dibayarkan adalah dengan pemanfaatan *grey area* atau kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam peraturan perpajakan maupun undang-undang yang berlaku sehingga tindakan tersebut tidak menyalahi aturan (Maraya & Yendrawati, 2016). *Tax avoidance* yang bersifat legal memberikan dampak negatif terhadap kinerja pemerintah, namun perusahaan meyakini bahwa pajak adalah beban tanggung

jawab bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan (Hoseini *et al.*, 2018). Menurut Widuri *et al.* (2020), perusahaan memutuskan untuk melakukan *tax avoidance* dengan harapan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keberagaman gender dalam komposisi dewan dan kinerja keberlanjutan perusahaan.

Tata kelola perusahaan menjelaskan fungsi, struktur, dan peran dewan dalam mengatur sebuah perusahaan (Naciti, 2019). Dewan memiliki peran yang krusial dalam tata kelola perusahaan. Dewan komisaris berperan sebagai pengawas dalam memantau dewan direksi, dewan direksi sendiri berperan dalam penetapan keputusan yang berguna bagi pengelolaan dan pemeliharaan perusahaan. Dalam pembuatan keputusan, dewan direksi harus bertindak dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan melindungi hak mereka (*fiduciary duty*). Keberagaman dalam dewan direksi, seperti dalam hal gender, kebangsaan, dan posisi dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan kinerja perusahaan (Naciti, 2019). Melihat keberagaman gender dan latar belakang budaya dalam komposisi dewan, dapat memberikan perusahaan pandangan yang lebih luas mengenai kemampuan wanita dalam memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan (Rossi *et al.*, 2017). Menurut Hoseini *et al.* (2018), *board gender diversity* yang dibuktikan dengan kehadiran wanita pada dewan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, tanpa perlu melakukan tindakan tidak etis seperti *tax avoidance*. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam menetapkan suatu keputusan bisnis, wanita mempunyai sifat yang lebih bertanggung jawab dan

cenderung menghindari risiko, serta memiliki tingkat ketelitian dan konservatisme yang tinggi (Ningrum *et al.*, 2018).

Kehadiran wanita dalam anggota dewan juga memberikan dampak yang positif pada pengambilan keputusan yang dapat mengurangi konflik antara pemangku kepentingan dengan manajemen (Velte, 2016). Pemangku kepentingan menjadi penilai apakah tata kelola perusahaan itu baik, melalui kemampuan perusahaan dalam menciptakan manfaat yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, dan ekonomi (Deegan, 2014). Kinerja keberlanjutan berkaitan dengan pembangunan lingkungan sosial dimana tercipta keseimbangan yang tepat antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan (ESG) (Jarboui *et al.*, 2020). Bentuk tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan salah satunya yaitu kontribusi pajak melalui pemerintah (Natalia *et al.*, 2021). Melalui *stakeholder theory* dijelaskan bahwa *board gender diversity* menyediakan kinerja sosial yang mendukung keberlanjutan perusahaan dan dapat mengurangi *tax avoidance* karena wanita dalam dewan mengutamakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (Jarboui *et al.*, 2020). Kehadiran wanita dapat meningkatkan *ESG performance*, begitu juga mampu mengurangi praktik *tax avoidance* melalui *ESG performance* itu sendiri (Widuri *et al.*, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu menyatakan hasil temuan yang berbeda-beda, beberapa penelitian membuktikan bahwa *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Hoseini *et al.*, 2018; Jarboui *et al.*, 2020; Ningrum

*et al.*, 2018; Riguen & Kachouri, 2019; Widuri *et al.*, 2020), namun terdapat juga penelitian yang menyimpulkan bahwa *board gender diversity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Alazzani *et al.*, 2017). Penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya meneliti hubungan antara *board gender diversity* dan *tax avoidance* secara langsung, hanya beberapa penelitian yang telah menguji hubungan antara *board gender diversity* dan *tax avoidance* secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan *ESG performance* yang menjadi variabel intervening. Penelitian Jarboui *et al.* (2020) menyatakan bahwa *sustainability performance* yang diukur dengan *ESG performance* sepenuhnya memediasi hubungan antara *board gender diversity* dan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Widuri *et al.* (2020) menyatakan hasil berbeda, yaitu kinerja keberlanjutan dengan *ESG performance* tidak dapat memediasi hubungan antara *board gender diversity* dan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan hasil beragam maka peneliti ingin menguatkan penelitian yang telah dilakukan oleh Jarboui *et al.* (2020) dan sesuai dengan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Board Gender Diversity* terhadap *Tax Avoidance* dengan *ESG Performance* sebagai Variabel Intervening”.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan dari latar belakang di atas yaitu:

1. Apakah *Board Gender Diversity* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Board Gender Diversity* berpengaruh signifikan positif terhadap *ESG Performance*?
3. Apakah *ESG Performance* dapat memediasi hubungan antara *Board Gender Diversity* dan *Tax Avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai diantaranya:

1. Untuk mengetahui apakah *Board Gender Diversity* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *Board Gender Diversity* berpengaruh signifikan positif terhadap *ESG Performance*.
3. Untuk mengetahui apakah *ESG Performance* dapat memediasi hubungan antara *Board Gender Diversity* dan *Tax Avoidance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang peneliti harapkan mampu diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Universitas Pelita Harapan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi baru dan menambah koleksi literatur di Johannes Oentoro Library. Hasil penelitian

ini diharapkan dapat membantu menyediakan materi pembelajaran bagi proses pengajaran di dalam kelas.

## 2. Untuk Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi terkait dengan pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh diversitas gender dalam anggota dewan dan kinerja keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang bermanfaat untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyediakan informasi dan wawasan baru kepada para peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan *board gender diversity*, *ESG performance*, dan *tax avoidance* di masa depan.

### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini akan menguji *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen.
2. Variabel independen pada penelitian ini yaitu *Board Gender Diversity* dan *ESG Performance* sebagai variabel intervening.
3. Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan selain sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki skor ESG di

Thomson-Reuters ASSET4 *database* dengan tahun observasi 3 tahun (2019, 2018, 2017).

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima buah bagian, seperti dibawah ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan terbagi menjadi beberapa sub bab yang membahas latar belakang dari penelitian ini, dimana terdapat beberapa masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, maupun batasan masalah dan sistematika pembahasan.

### **BAB II KERANGKA LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini akan berisikan pembahasan atas teori-teori yang digunakan di dalam penelitian, kerangka konseptual penelitian, telaah literatur yang mencakup penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas metode untuk pengujian yang digunakan dalam studi ini, yaitu termasuk populasi dan sampel, model empiris penelitian, operasionalisasi variabel serta metode analisa untuk mengolah data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan temuan-temuan empiris berdasarkan penelitian mengenai pengaruh *Board Gender Diversity* terhadap *Tax Avoidance* dan *ESG Performance*, maupun pengaruh dari *ESG Performance* dalam memediasi hubungan antara *Board Gender Diversity* dan *Tax Avoidance*.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini akan mencakup kesimpulan dan ketebatasan penelitian atas hasil dan pembahasan pada bab yang sebelumnya. Dalam bab ini juga peneliti akan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

